

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2022 merupakan tahun empat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan sasaran Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019 ditetapkan 3 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang mengacu pada Misi Kedua RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 yakni **“Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good and clean Government)”** sasaran RPJMD **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”**

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD tersebut diatas dirumuskan tujuan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah yakni

1. Pengelolaan keuangan daerah yang makin baik ;
2. Pendapatan Asli Daerah yang makin meningkat.

Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023. Telah dilakukan pengukuran keberhasilan pencapaiannya pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra yakni tahun 2022. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 sebagai tahun keempat pelaksanaan Renstra dan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dan target akhir Renstra tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama BPKD Tahun 2022 dan Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	2022			Renstra 2023	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi s.d 2022
1 Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	Poin	2 poin	2 poin	2 poin	100	2 poin	2 poin
2 Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	Persen	82,86	100	71,42	71,42	100	71,42
3 Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD	Persen	85,71	100	n.a	n.a	100	n.a
4 Presentase Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD	Persen	9,00	11,5	n.a	n.a	12	n.a
5 Presentase Peningkatan PAD	Persen	8,61	10	57,81	578	10	578
Rata-rata Capaian					249,86		249,86

Rata-rata Capaian IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 sebesar 249,86% atau berkinerja **Tinggi** ($\geq 90,1$). Capaian tersebut pengukuran terhadap indikator kinerja Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD dan Persentase menurunnya temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD Tahun 2022 yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Penjelasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan perencanaan anggaran yang diukur dengan ketepatan waktu penetapan KUA PPAS dengan capaian 2 poin yang artinya tepat waktu, berarti bahwa penetapan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 tepat waktu sesuai jadwal

yang ditentukan. Hal ini menunjukkan perencanaan dan penganggaran yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tingkat kepatutan pelaksanaan anggaran yang diukur dengan persentase SKPD yang melaksanakan anggaran sesuai dengan anggaran kas adalah indikator yang menggambarkan tingkat kematangan perencanaan anggaran yang turut mempengaruhi kepatutan dalam pelaksanaannya. Indikator kinerja ini ditargetkan 100% pada tahun 2022, terealisasi 85,71% atau tingkat capaian 85,71%.
3. Tingkat kepatutan penyajian LKPD yang diukur dengan jumlah komponen pelaporan LKPD yang disajikan secara berkualitas pada tahun 2022, diukur dari 7 (tujuh) komponen LKPD yang disajikan dengan berkualitas, namun saat ini masih dalam tahap proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga belum mendapatkan angka realisasi atas capaian kinerja dimaksud.
4. Indikator Persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD yang belum terdapat realisasi dikarenakan belum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Aset Pemerintah Daerah.
5. Indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator yang mencapai target dan berkinerja tinggi yakni sebesar 57,81%. Pada pos-pos tertentu terdapat beberapa realisasi yang telah melampaui target yang secara langsung mendukung hasil capaian realisasi PAD seperti misalnya pada pos pajak daerah yang sebagian besar bagiannya telah melampaui target dengan rata-rata capaian 100%. Pada pos pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, PBBP2 dan BPHTB mengalami kenaikan sebesar 22% dari tahun sebelumnya.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

I.2. GAMBARAN SINGKAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

I.3. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Unsur Pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang di Pimpin oleh Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan Daerah
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan keuangan daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan Daerah;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan keuangan daerah.

1.4. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris terdiri dari:
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Program Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - Kasubid Perpelaksanaan dan pengendalian anggaran
 - Kasubid Perencanaan Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari
 - Kasubid Perbendaharaan I
 - Kasubid Perbendaharaan II
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
 - Kasubid Pembukuan dan Pelaporan
 - Kasubid Akuntansi Pemerintah Daerah
- f. Bidang Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - Kasubid Penatausahaan BMD
 - Kasubid Pengelolaan BMD
- g. Bidang Pendapatan
 - Kasubid Dana perimbangan PBB,P2 dan BPHTB
 - Kasubid Non PBB/ PBHTB
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.5. SUMBER DAYA ORGANISASI

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya aparturnya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara didukung oleh sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi sebanyak 33 personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut pangkat dan golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
2.	Pembina, IV/a	3 Orang
3.	Panata Tingkat I, III/d	2 Orang
4.	Penata, III/c	10 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I, III/b	8 Orang
6.	Penata Muda, III/a	4 Orang
7.	Pengatur Tingkat I, II/d	1 Orang
8.	Pengatur, II/c	3 Orang
T o t a l		32 Orang

Tabel 1.2 Jumlah pegawai Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2/Magister	3 Orang
2.	S 1/Sarjana	23 Orang
3.	DIII/Sarjana Muda	6 Orang
T o t a l		32 Orang

Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjejeangan :

- Pim II : 0 Orang
- Pim III : 5 Orang
- Pim IV : 9 Orang

I.6. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sasaran strategis jangka menengah Renstra Perangkat Daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dadan Pengelola Keuangan Daerah pada pada tahun-tahun sebelumnya serta hasil pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran dalam Rencana Strategis maka Kondisi dan proyeksi yang diharapkan kedepan adalah :

- a. Peningkatan dan Penyempurnaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah, diharapkan adanya penyempurnaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang menyeluruh mulai dari tahap perencanaan yang berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan yang berkaitan dengan realisasi anggaran, pertanggungjawaban yang menyangkut pengesahan penggunaan dana serta pelaporan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Penyempurnaan dimaksud haruslah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah serta harus mampu menutupi kekurangan dan kelemahan yang ada saat ini.
- b. Peningkatan kompetensi aparat Pengelola Keuangan Daerah, kemampuan dan keterampilan aparat pengelola keuangan perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini mengingat adanya peraturan perundang-undangan yang dinamis dan terus berkembang.
- c. Peningkatan serta penyempurnaan pengelolaan Aset daerah, yaitu kedepan seluruh Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikelola dan tertata dengan baik.
- d. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mencapai target PAD yang telah ditentukan.
- e. Peningkatan pengendalian Internal diharapkan dapat secara langsung mempengaruhi tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah yakni mendapatkan opini WTP atas pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan uraian diatas isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah;

3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
4. Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal pengelolaan keuangan daerah;
dan
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah 2019-2023 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2019-2023 bahwa Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023 adalah **Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 (Empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good and clean Government*);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023 ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia : Kualitas sumberdaya manusia masih tergolong rendah yakni 65,60 pada tahun 2017, ditargetkan meningkat menjadi 66,23 pada tahun 2023.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani : Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menjawab tuntutan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga itu seluruh prioritas area perubahan dalam rangka reformasi birokrasi akan konsisten dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan : Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka dan berkualitas diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan sehingga ditargetkan pertumbuhan yang positif terus terjaga hingga pada angka 6,24 persen pada tahun 2023.
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan menjadi syarat mutlak yang terus dipertahankan dan ditingkatkan sejalan pembangunan infrastruktur. Sedangkan dari aspek kuantitas sampai dengan tahun 2023 tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur terhadap rencana tata ruang ditargetkan sesuai dengan arahan indikasi program utama.

Sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut diatas ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya daya beli masyarakat;
4. Menurunnya beban pengeluaran keluarga;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatnya pelayanan public;
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local; dan
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran SKPD

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun sebagai pengejawantahan perencanaan strategis perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

A. Tujuan

Pencapaian Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam RPJMD sangat ditentukan oleh perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai instansi yang membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, BPKD menetapkan tujuan jangka menengah sebagai pengejawantahan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 Badan Pengelola Keuangan Daerah mengampuh peran strategis pada pencapaian Misi kedua yakni Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and clean Government*), Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pada indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Untuk mengejawantahkan sasaran RPJMD tersebut diatas ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang makin baik ;
2. Pendapatan Asli daerah Makin Meningkat.

B. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran Perangkat Daerah dipertajam dengan penetapan indikator dan target yang terukur masing-masing sasaran sehingga dapat dinilai keberhasilan dan kegagalannya.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan daerah Tahun 2019-2023 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut diatas ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah memuat rumusan indikator kinerja, formulasi pengukuran dan unit penanggung jawab pada masing-masing perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Keterkaitan (Interelasi) Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Keuangan Yang Makin baik	1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.1 Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran
			1.1.2 Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran
			1.1.3 Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah	1.2.1 Presentase Menurunnya temuan terkait Penatausahaan BMD
2.	Pendapatan Asli daerah Makin Meningkat	2.1 Meningkatnya PAD	2.1.1 Persentase Peningkatan PAD

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Type	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	Ketepatan waktu penetapan KUA PPAS	Poin	BPKD
2.	Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan anggaran sesuai anggaran kas}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	Absolut	BPKD

1	2	3	4	5
3.	Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD	$\frac{\text{Jumlah komponen LKPD yang disajikan secara berkualitas}}{\text{Jumlah komponen LKPD yang disajikan}} \times 100\%$	Absolut	BPKD
4.	Persentase Menurunnya temuan terkait Penatausahaan BMD	$\frac{(\text{Jumlah temuan tahun n-2}) - (\text{jumlah temuan tahun n-1})}{\text{Jumlah temuan tahun n-2}} \times 100\%$	Absolut	BPKD
5.	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{PAD Tahun n} - \text{PAD Tahun n1}}{\text{PAD Tahun Tahun n1}} \times 100\%$	Absolut	BPKD

Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut diatas dilaksanakan dengan ditunjang oleh 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2022
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1 Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	Poin	2
	1.2 Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	Persen	100,00
	1.3 Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD	Persen	100,00
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah	2.1 Presentase Menurunnya temuan terkait Penatausahaan BMD	Persen	11,50
3. Meningkatnya PAD	3.1 Persentase Peningkatan PAD	Persen	10,00

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang

dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Perubahannya. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja. Skala nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai target

Adapun dasar yang dipergunakan dalam menentukan skala nilai peringkat kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2.	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3.	$65,1 \leq 75$	Sedang
4.	$50,1 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan yakni 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut:

- ▶ Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator;
- ▶ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator.

► Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : ...Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 sebagai tahun keempat pelaksanaan Renstra dan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dan target akhir Renstra tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun BPKD 2022 dan Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	2022			Renstra 2023	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi
1 Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	Poin	2 poin	2 poin	2 poin	100	2 poin	2 poin
2 Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	Persen	82.86	100	71,42	71,42	100	71,42
3 Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD	Persen	85.71	100	n.a	n.a	100	n.a
4 Presentase Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD	Persen	9.00	11,5	n.a	n.a	12	n.a
5 Presentase Peningkatan PAD	Persen	8.61	10	57,81	578	10	578
Rata-rata Capaian					364,12		364,12

Rata-rata Capaian IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 sebesar 364,12% atau berkinerja Sangat Tinggi



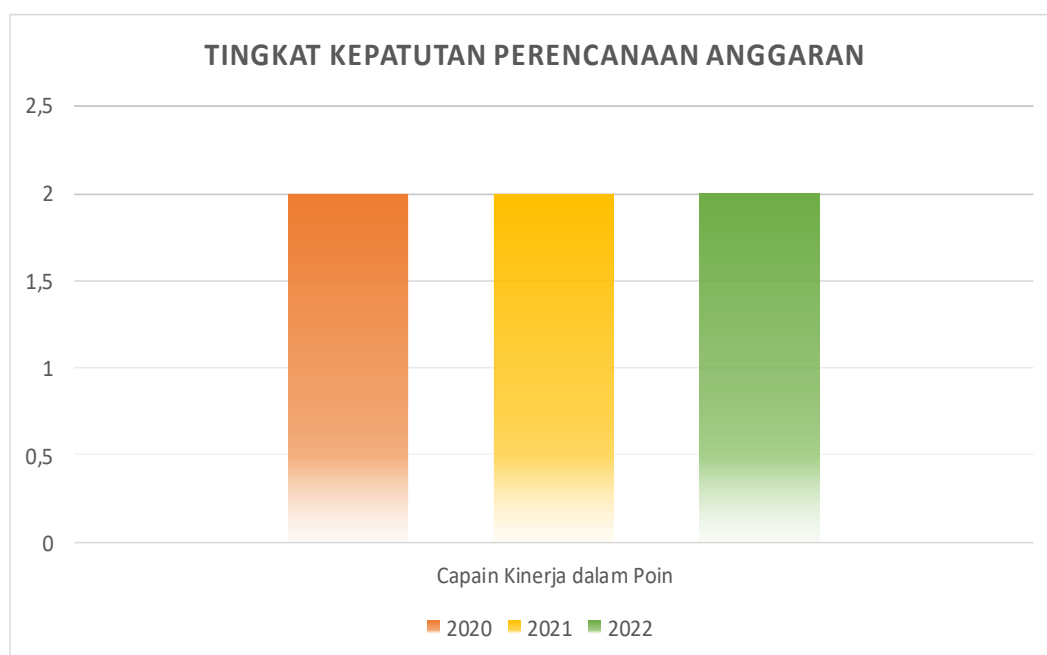
($\geq 90,1$). Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai target yakni Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran yang ditargetkan 2 poin terealisasi 2 poin atau tingkat capaian 100% dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target yakni presentase peningkatan PAD yang ditargetkan sebesar 10% terealisasi sebesar 57,81% atau tingkat capaian 578%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target adalah Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran yang ditargetkan 100% terealisasi dengan angka 71,42%. Untuk Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti terdapat sebanyak 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yang masih mengajukan pergeseran anggaran sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kurang disiplinnya Organisasi Perangkat Daerah pada pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaannya. Indikator tingkat kepatutan penyajian laporan yang ditargetkan 100,00% belum terdapat realisasi untuk Tahun 2022 dikarenakan masih dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Tahun 2022 oleh bidang akuntansi; dan indikator persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaa BMD yang diargetkan 11% belum terdapat realisasi dikarenakan belum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Aset Pemerintah Daerah. Penjelasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Tingkat kepatutan perencanaan anggaran

- a. Tingkat kepatutan perencanaan anggaran yang diukur dengan ketepatan waktu penetapan KUA PPAS, dengan target sebesar 2 poin dapat dicapai dengan realisasi sebesar 2 poin.
- b. Capaian Kinerja atas indikator Kepatutan Perencanaan Anggaran sebesar 2 poin pada Tahun Anggaran 2022, jika dibandingkan dengan realisasi pada tiga tahun sebelumnya yakni pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dijelaskan melalui chart berikut :



Melihat chart diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi antara tahun 2020 sampai dengan 2022 masih mencapai target.

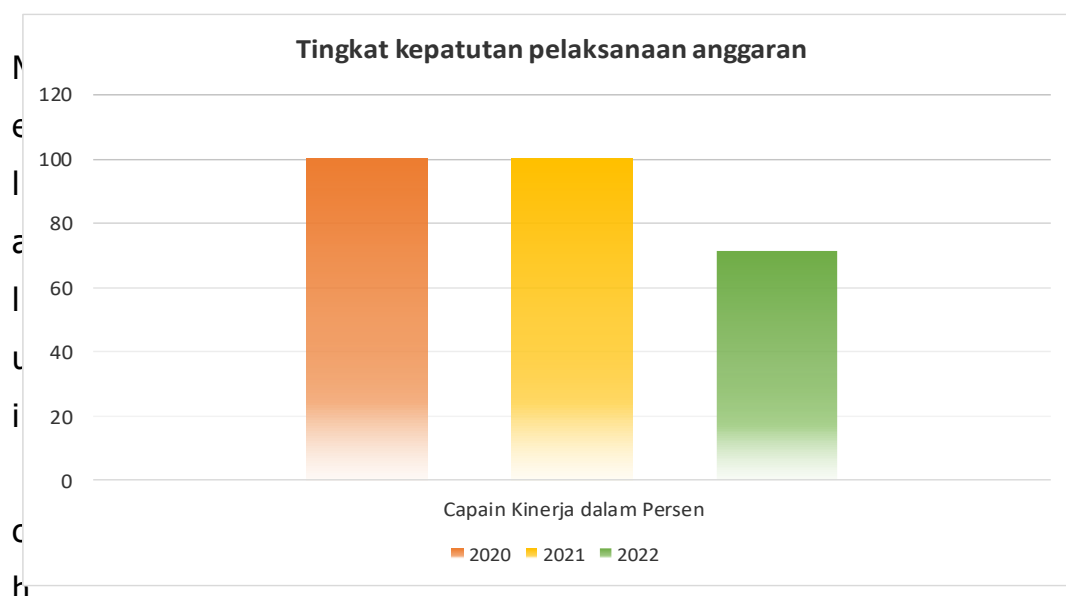
- c. Pada indikator Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran untuk target akhir RPJMD adalah pada angka 2 poin, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yakni sebesar 2 poin dapat disimpulkan bahwa target akhir RPJMD dapat tercapai pada Tahun Anggaran 2022.

- d. Berdasarkan angka yang telah dicapai pada realisasi Tahun Anggaran 2022 yakni 2 poin atau tingkat keberhasilan pada indikator ini sudah mencapai target. Hal ini dapat dicapai dengan perencanaan yang matang mulai dari dokumen RENSTRA hingga RENJA dan kemudian akan diinput pada RKA sampai pada penetapan KUA PPAS yang sesuai dengan ketentuan batas waktu.
- e. Dalam pencapaian realisasi yang telah sesuai dengan target juga didukung oleh Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran. Berikut Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat keberhasilan pencapaian target :
- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- f. Pada Indikator Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran terdapat efisiensi Anggaran sebanyak Rp85.979.750,00 atau sebesar 24,29% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Efisiensi Anggaran	
		Rp	%
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	8.468.500,00	19,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3.359.000,00	9,13
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	42.042.850,00	19,32
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	32.109.400,00	24,43
Total		85.979.750,00	24,29

2. Tingkat kepatutan pelaksanaan anggaran

- a. Tingkat kepatutan pelaksanaan anggaran yang diukur dengan persentase SKPD yang melaksanakan anggaran sesuai dengan anggaran kas adalah indikator yang menggambarkan tingkat kematangan perencanaan anggaran yang turut mempengaruhi kepatutan dalam pelaksanaannya. Indikator kinerja ini ditargetkan 100% pada tahun 2022, terealisasi 71,42% atau tingkat capaian 71,42%. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran kas pada tahun 2022.
- b. Capaian Kinerja atas indikator Kepatutan Pelaksanaan Anggaran sebesar 71,42% pada Tahun Anggaran 2022, jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yakni pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dijelaskan melalui chart berikut :



Melihat chart diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan realisasi antara tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebesar 28,58%.

- c. Pada indikator Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran untuk target akhir RPJMD adalah pada angka 100%, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yakni sebesar 71,42% dapat disimpulkan bahwa target akhir RPJMD belum dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022.
- d. Berdasarkan angka yang telah dicapai pada realisasi Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar 71,42% atau tingkat keberhasilan pada indikator ini belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang

dari OPD pada saat menyusun anggaran kas, sehingga pada tahap pelaksanaan anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

- e. Dalam usaha pencapaian realisasi yang telah mencapai target, indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran. Berikut Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat keberhasilan pencapaian target :
- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- f. Pada Indikator Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran terdapat efisiensi Anggaran sebanyak Rp.20.442.400,00 atau sebesar 59,84% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Efisiensi Anggaran	
		Rp	%
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20.441.400,00	59,84
Total		20.441.400,00	59,84

3. Tingkat kepatutan penyajian LKPD

- a. Indikator tingkat Kepatutan Penyajian LKPD yang diukur dengan jumlah komponen pelaporan LKPD yang disajikan secara berkualitas pada tahun 2020, dari 7 (tujuh) komponen LKPD yakni LRA, LO, LPE, Neraca, LPSAL, LAK, CaLK semuanya sudah memenuhi kualifikasi berkualitas, yang artinya semua unsur telah terpenuhi dan mencapai target yang telah ditentukan.
- b. Capaian Kinerja atas indikator Kepatutan Penyajian LKPD pada Tahun Anggaran 2022 belum mendapatkan angka realisasi sehingga belum dapat membandingkan dengan keadaan realisasi pada dua tahun sebelumnya.
- c. Dalam usaha pencapaian realisasi meskipun belum terdapat realisasi, indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD. Berikut Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat keberhasilan pencapaian target :
- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- ✓ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - ✓ Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Pada Indikator Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran terdapat efisiensi Anggaran sebanyak Rp.11.668.500,00 atau sebesar 16,71% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Efisiensi Anggaran	
		Rp	%
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	9.482.800,00	16,71
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.185.700,00	1,04
Total		11.668.500,00	16,71

4. Menurunnya terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD

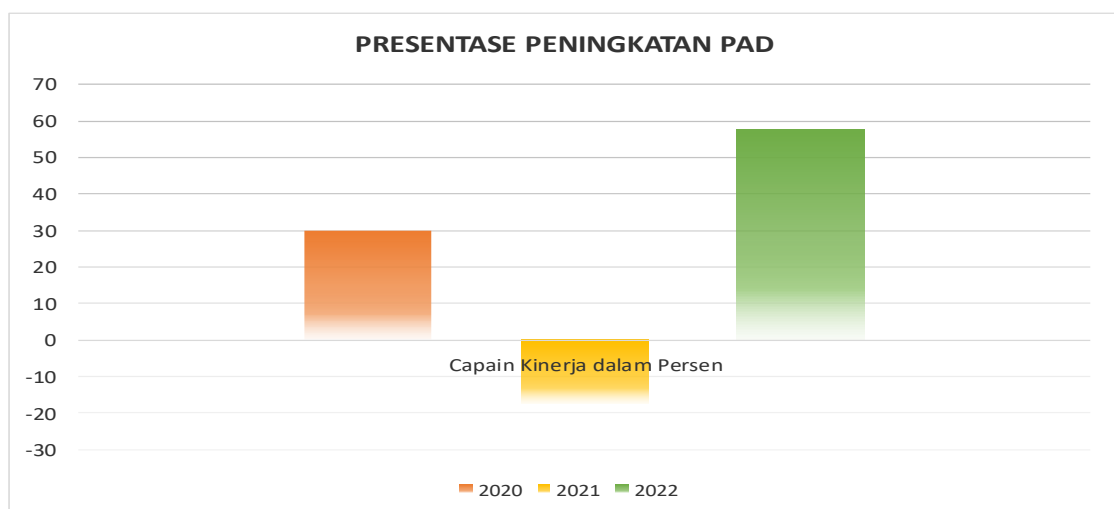
- a. Indikator Presentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD target yang telah ditetapkan yakni 11,5% namun belum terdapat realisasi dikarenakan belum adanya Laporan Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2022, tahapan saat ini masih ada pada tahap audit awal.
- b. Capaian Kinerja atas indikator Persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2022 belum terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya yakni Tahun 2020 dan 2021
- c. Dalam usaha pencapaian realisasi meskipun belum terdapat realisasi, indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Menurunnya temuan terkait BMD. Berikut Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat keberhasilan pencapaian target :
 - ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ✓ Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
- e. Pada Indikator Menurunnya Temuan terkait BMD terdapat efisiensi Anggaran sebanyak Rp.167.664.180,00 atau sebesar 30,69% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Efisiensi Anggaran	
		Rp	%
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	117.000,00	0,18
2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	13.252.100,00	16,37
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	95.905.580,00	23,88
4	Penilaian Barang Milik Daerah	58.389.500,00	82,31
Total		167.664.180,00	30,69

5. Indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target yakni 57,81% dari target peningkatan sebesar 10% atau tingkat capaian 578%. Tercapainya realisasi dari target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pada pos Pajak Daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, PBBP2 dan BPHTB mengalami kenaikan sebesar 22% dari tahun sebelumnya.
- b. Capaian Kinerja atas indikator Presentase Peningkatan PAD sebesar 57,81% pada Tahun Anggaran 2022, jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yakni pada Tahun 2021 dan 2022 dapat dijelaskan melalui chart berikut :



- c. Pada indikator indikator Presentase Peningkatan PAD untuk target akhir RPJMD adalah pada angka 10%, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yakni sebesar 57,81% dapat disimpulkan bahwa target akhir RPJMD telah dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022.
- d. Dalam usaha pencapaian realisasi walaupun belum mencapai target, indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Presentase Peningkatan PAD. Berikut Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat keberhasilan pencapaian target :
- ✓ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - ✓ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - ✓ Sub Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- e. Pada Indikator Presentase Peningkatan PAD terdapat efisiensi Anggaran sebanyak Rp.134.722.202,00 atau sebesar 0,23% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Efisiensi Anggaran	
		Rp	%
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	27.526.469,00	11,19
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12.914.600,00	14,50
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	53.724.400,00	36,19
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	67.048.800,00	69,77
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.643.500,00	12,06
6	Penagihan Pajak Daerah	39.156.000,00	100,00
Total		203.013.769,00	40,62

3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Tahun 2022 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada beberapa table berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	2022			Renstra 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1	Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	Point	2	2	2	100	2	100
		1.2	Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	Persen	82,86	100	71,42	71,42	100	71,42
		1.3	Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD	Persen	85,71	100	n.a	n.a	100	n.a
<i>Rata-rata Capaian Strategis I</i>							85,71		85,71	
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah	2.1	Presentase Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD	Persen	9,00	11,5	n.a	n.a	12	n.a
<i>Rata-rata Capaian Strategis 2</i>							n.a		n.a	
3	Meningkatnya PAD	3.1	Presentase Peningkatan PAD	Persen	8,61	10	57,81	578,10	10	578,10
<i>Rata-rata Capaian Strategis 3</i>							578,1		578,1	
<i>Rata-rata Capaian</i>							249,86		249,86	

No.	Interpretasi	Sasaran Strategis	Capaian
1.	Belum terdapat Realisasi	2	40%
2.	Sesuai Target	2	40%
3.	Tidak Mencapai target	1	20%

Kinerja sasaran yang mencapai target terdapat 2 atau 40% yakni pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tingkat capaian 85,71% dan Meningkatnya PAD dengan tingkat capaian 578,1%. Sedangkan sasaran yang tidak mencapai target terdapat 1 sasaran atau 20% yaitu tingkat kepatutan pelaksanaan anggaran dengan capaian 71,42% dan sasaran yang belum terdapat realisasi yakni Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis dilakukan terhadap 5 indikator kunci keberhasilan dengan hasil yang dicapai terdapat 2 indikator atau 40,00% sesuai target, 1 indikator yang tidak mencapai target dan 2 indikator atau 60,00% yang belum terdapat realisasi, seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Pada BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

No	Sasaran	Jlh Indikator	Interpretasi					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Tidak Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	3	0	0	1	100	1	71,42
2	Sasaran 2	1	0	0	0	0	0	0
3	Sasaran 3	1	1	578,1	0	0	0	0
Total		5	1		1		1	

- ✓ Capaian Indikator yang sesuai target adalah :
 - Tingkat kepatutan perencanaan anggaran dengan tingkat capaian 100%;
 - Meningkatnya PAD dengan tingkat capaian 578%
- ✓ Capaian Indikator yang tidak mencapai target masing-masing :
 - Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi 71,42%
- ✓ Capaian Indikator yang belum terdapat realisasi masing-masing :
 - Persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD
 - Tingkat kepatutan penyajian LKPD

No	Tujuan/Sasaran	IK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	2 Poin	2 poin	100	keberhasilan capaian atas IK ini merupakan bagian dari perencanaan sampai penganggaran yang matang dan sesuai ketentuan berlaku	
		Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	100	71,41	71,42	IK tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan masih terdapat OPD yang melakukan pergeseran anggaran kas	dapat dilaksanakan pematangan perencanaan anggaran kas pada OPD
		Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD	100	n.a	n.a	IK belum terdapat realisasi karena masih dalam proses penyusunan LKPD dan akan diaudit oleh BPK	
2	Meningkatnya kualitas manajemen Barang milik daerah	Presentase Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD	11,5	n.a	n.a	IK belum terdapat realisasi dikarenakan belum adanya LHP atas LKPD Pemda Tahun Anggaran 2022	
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Presentase Peningkatan PAD	10	57,81	578	IK ini dapat melampaui target dikarenakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pajak-pajak daerah yang dimaksimalkan pengelolaannya	

1.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DPA Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan total nilai anggaran belanja sebesar Rp.16.830.247.690,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.14.483.366.928,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,86%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) belanja sebesar Rp. 2.547.183.567,- atau tingkat efisiensi anggaran sebesar 15,13% dari anggaran belanja.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp. 14.270.215.777,- |
| 2. Belanja Modal | Rp. 485.748.304,- |
| | Rp. 16.830.247.690,- |

Realisasi

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp. 13.239.295.143,- |
| 2. Belanja Modal | Rp. 449.615.000,- |
| | Rp. 14.483.366.928, |

1.4. Inovasi Yang Dilaksanakan Untuk Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih efektif dan akuntabel pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dikembangkan beberapa sistem informasi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan pengelolaan pajak daerah. Inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Sistem Informasi yang dikembangkan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

No.	Inovation	Before	After
1	2	3	4
1.	Kasda Online Pemkab	Pelaksanaan posting SP2D dilakukan oleh bank Sulutgo sehingga memakan waktu yang lebih lama	SP2D diposting di kasda online yang ditempatkan di BPKD sehingga dapat mengifisiensi waktu pemindahbukuan ke rekening penerima
2.	Kasda Online OPD	Perangkat daerah melakukan pemindahbukuan/transaksi rekening kantor melalui bank Sulutgo	Setelah memakai aplikasi kasda online versi 2.0 OPD melalui user yang telah ditentukan dapat melakukan pemindahbukuan melalui aplikasi bank Sulutgo serta dapat melakukan pencetakan transaksi secara mandiri melalui aplikasi
3.	Kasda Online Desa	Perangkat desa melakukan pemindahbukuan/transaksi rekening desa melalui bank Sulutgo	Setelah memakai aplikasi kasda online versi 2.0 perangkat desa melalui user yang telah ditentukan masing-masing dapat melakukan pemindahbukuan melalui aplikasi bank sulutgo serta dapat melakukan pencetakan transaksi secara mandiri melalui aplikasi
4.	Financial Management Information System	Sebelumnya OPD diharuskan melakukan eksport data SPM yang akan diterbitkan SP2D oleh bidang perbendaharaan	Setelah memakai FMIS, mulai dari perencanaan sampai dengan penatusahaan dan pelaporan sudah menggunakan satu aplikasi yang

		melalui flashdisk	terkoneksi
5.	Aplikasi PBB	Bidang Pendapatan melakukan pencetakan SPPT pajak di kotamobagu	Setelah adanya aplikasi PBB Bidang Pendapatan dapat melakukan pencetakan SPPT Pajak di kantor
6.	Aplikasi PBB Online	Wajib pajak melakukan pengecekan manual di kantor keuangan bidang pendapatan perihal jumlah pajak yang harus disetor	Wajib pajak dapat melakukan pengecekan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui aplikasi PBB online kapan dan dimana saja
		Sebelumnya bidang pendapatan kesulitan melakukan sinkronisasi database wajib pajak dan rekonsiliasi wajib pajak yang telah melakukan penyetoran dengan bank SulutGo	Sudah tersinkronisasi secara online antara database wajib pajak yang ada dibidang pendapatan dengan database yang ada di bank Sulutgo
7.	Aplikasi e-TTP	Sebelum masa pandemi COVID 19 pelaksanaan absensi oleh ASN dilakukan dengan menggunakan finger print dan rawan terhadap penularan COVID 19	Telah dikembangkan sistim absensi menggunakan android system, ASN melakukan absensi melalui Handpone masing-masing dengan waktu dan koordinat lokasi yang telah ditetapkan
			Penularan COVID 19 melalui media absensi dapat dihindari

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan demikian, LAKIP ini merupakan sarana bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama yang dilaksanakan pada tahun 2021, dikategorikan sangat tinggi meskipun terdapat indikator yang belum terdapat realisasi.

Dilain pihak bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai penerima amanah selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diterima, LKjIP merupakan umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang berhasil dicapai, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan serta untuk keperluan lain dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Badan Pengelola Keuangan untuk meningkatkan kinerja yaitu :

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Melakukan penyesuaian-penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan sesuai perkembangan peraturan terbaru yang menjadi acuan;
3. Terus mengoptimalkan sosialisasi terhadap wajib pajak atau masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.
4. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan sistim informasi (aplikasi) yang akan yang menunjang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja pemegang amanah.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimasa yang akan datang.

Boroko, Februari 2023

**Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

**SIRAJUDIN LASENA, SE.M.Ec.Dev
Pembina Tkt I/ IV.b
NIP. 19730108 200802 1 001**